BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Pemerintah Indonesia Melakukan Kerjasama Keamanan Maritim Dengan Pemerintah Australia

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia dalam bidang pertahanan dan keamanan telah terjalin sejak awal tahun 1970an. Sejak dahulu, dinamika hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Berbagai permasalahan seperti isu Timor Timur dimana Australia dinilai Indonesia terlalu mencampuri urusan politik dalam negeri negara kepulauan tersebut, hingga isu terorisme pasca meledaknya Bom Bali 1 memberikan implikasi yang buruk pada pola hubungan kedua negara itu. Namun tidak dapat terlepaskan fakta bahwa kedua negara bertetangga tersebut saling memerlukan satu sama lain untuk bekerjasama mengatasi ancaman yang ada di wilayah perairan perbatasannya.

Terdapat dua alasan yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia ingin menjalin kerjasama keamanan maritim dengan pemerintah Australia. Alasan pertama Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia adalah untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang terdapat di perairan Indonesia terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia. Perlunya pengakuan kedaulatan yang dimasukkan kedalam suatu dokumen perjanjian agar Australia lebih menghormati dan menghargai serta tidak mencampuri kedaulatan dan urusan politik dalam negeri

Indonesia menjadi alasan kedua Indonesia menjalankan kerjasama keamanan martim dengan Australia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, di satu sisi mempunyai posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengamankannya. Secara geografis, Indonesia memiliki total luas perairan sebesar 5.877.879 km. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dari luas tersebut perairan Indonesia menetapkan jalur-jalur di wilayah perairan Indonesia yang dapat digunakan oleh kapal laut atau pesawat udara asing untuk dapat melaksanakan pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus cepat dan tidak terhalang oleh ruang dan udara perairan teritorial Indonesia. Jalur tersebut dikenal dengan istilah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengamanan ALKI merupakan agenda strategis bagi kepentingan nasional Indonesia serta masyarakat internasional.

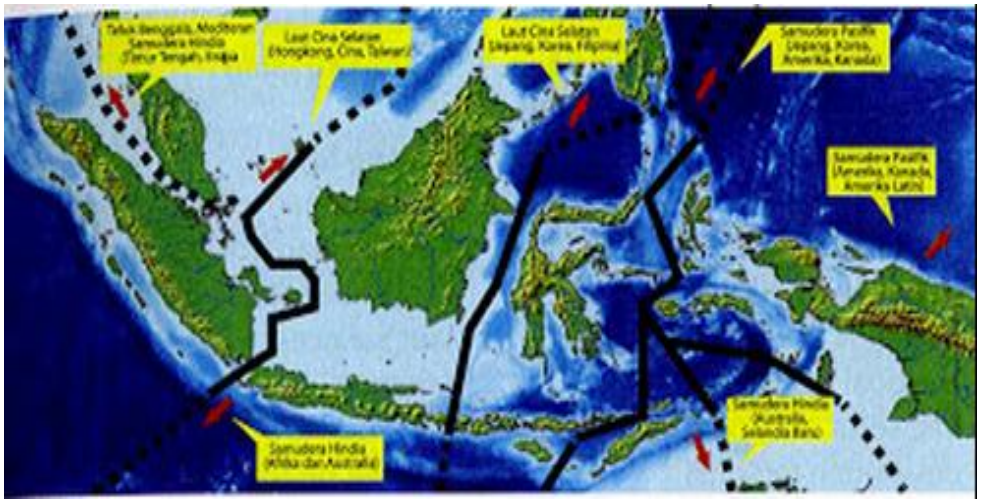
ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi:

1. ALKI I melintasi Laut Cina Selatan – Selat Karimata – Laut Jawa – Selat Sunda.
2. ALKI II melintasi Laut Sulawesi – Selat Makassar – Lautan Flores – Selat Lombok.
3. ALKI III melintasi Samudera Pasifik – Selat Maluku, Laut Seram – Laut Banda

(http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=1139 diakses pada tanggal 03/09/2013).

Gambar 4.1

Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



(Sumber: http://ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/10867)

Dinamika interaksi global berimplikasi terhadap tantangan keamanan nasional dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara. Seperti ALKI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan legal dan damai, disalahgunakan oleh para imigran gelap dan pencari suaka yang ingin memasuki wilayah Australia melalui perairan Indonesia. Imigran gelap dan pencari suaka di perairan Indonesia dapat berpotensi sebagai aktivitas yang dapat mengancam

keamanan di perairan terutama yang berbatasan dengan negara Australia, karena dikhawatirkan diantara imigran gelap tersebut disusupi oleh teroris, penjahat perang dan perdagangan manusia. Bentuk ancaman lain yang terdapat di perairan Indonesia yakni penyeludupan senjata, nelayan ilegal, serta penyelundupan narkotika. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara menjadi salah satu tantangan untuk ditanggulangi secara serius dengan menggunakan pendekatan lintas lembaga, baik secara militer maupun nonmiliter. Namun luasnya perairan Indonesia yang harus terjaga kedaulatannya tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertahanan, oleh karenanya banyak ancaman-ancaman yang luput dari pengawasan.

Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas negara tersebut telah mempengaruhi kebijakan keamanan global dan pertahanan negara-negara besar yang menempatkan isu-isu tersebut sebagai isu keamanan bersama. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara telah sangat merugikan kepentingan nasional sehingga merupakan suatu prioritas untuk ditangani.

Pemberlakuan UNCLOS telah memberikan kebebasan bagi negara yang memiliki wilayah laut untuk dapat memanfaatkan secara maksimal potensi kelautan yang dimiliki dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam tataran pelaksanaannya, terjadi benturan kepentingan antar negara, sehubungan dengan pemanfaatan wilayah laut tersebut. Oleh karena itu agar kepentingan nasional masing-masing negara terpenuhi maka negara-negara tersebut dalam hubungannya

akan saling tergantung (interdependensi), dimana kepentingan nasional akan dapat terpenuhi melalui kerjasama internasional.

Perjanjian keamanan Indonesia-Australia, merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh Indonesia, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan cenderung terbuka. Perjanjian ini berfungsi sebagai kontrol wilayah dan geografi karena di dalamnya disepakati berbagai kerjasama keamanan, termasuk kerjasama dalam bidang keamanan maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dalam kenyataannya, ternyata belum diimbangi dengan kemampuannya dalam kontrol geografi dan wilayah.

Kompleksnya permasalahan dalam bidang pertahanan Indonesia, khususnya pada jumlah alutsista yang memadai untuk mengontrol keamanan di wilayah Indonesia terutama di wilayah laut, menghambat tugas pengamanan tersebut sehingga kemampuan kontrol geografi Indonesia menjadi terbatas. Kemampuan kontrol geografi dapat ditingkatkan salah satunya melalui cara bekerja sama dengan sejumlah negara tetangga seperti Australia.

Kepentingan Indonesia untuk meningkatkan kontrol geografi di daerah perairan sejalan dengan kepentingan strategis Australia untuk mendukung keamanan maritim dari negara tetangga terdekat serta memastikan pertahanan Australia dari ancaman pihak asing. Keuntungan strategis yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam kerjasama ini adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama keamanan maritim ini sebaik mungkin demi tercapainya kepentingan nasionalnya.

Kontrol geografi ini muncul karena adanya ancaman dan tantangan diwilayah kedaulatan Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk ancaman yang dapat mengganggu kestabilitasan kamanan di Indonesia adalah aktivitas imigran gelap dan pencari suaka. Dari tahun 2007 sampai tahun 2009 imigran gelap yang masuk ke Indonesia hanya berjumlah ratusan. Imigran gelap tersebut paling banyak berasal dari Afganistan dengan jumlah 797 orang, sisanya berasal dari Srilanka, Irak, Iran dan Myanmar. Di tahun 2010 imigran gelap tanpa identitas yang tertangkap berjumlah 1.287 orang, sebagian besar dari mereka tertangkap di wilayah perairan Indonesia (http://pencarisuakaindonesia.blogspot.com/2011/03/penyelundupan-manusia-atau-people.html diakses pada tanggal 04/02/2014).

Sedangkan menurut Pakar Hukum Migrasi dan Pengungsi, Universitas Adelaide, Australia, Associate Professor Alexander Reilly, Ph.D., mengatakan, bahwa Australia selalu menjadi daerah tujuan bagi pengungsi dan pencari suaka. Sejak Perang Dunia II, lebih dari 700 ribu pengungsi telah ditampung di Australia. Jika melihat data Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia (DIMIA) jumlah imigran gelap pencari suaka dengan menggunakan kapal naik sangat sigifikan. Jumlah imigran gelap pencari suaka dengan menggunakan kapal mulai dari periode 2008-2009 jumlahnya semakin banyak, mencapai hingga angka 22 ribu orang (http://www.ugm.ac.id/id/berita/8714pengamat.ugm:.Kasus.imigran.gelap.australia.perlu.bersikap.adil diakses pada tanggal 25/02/2014).

Dari data tersebut dapat dilihat terdapatnya peningkatan aktivitas imigran gelap dan/atau pencari suaka menuju Australia yang melewati perairan Indonesia. Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai negara transit karena Indonesia bebatasan laut dengan Australia. Luasnya laut Indonesia dan juga terbuka mempermudah para imigran gelap untuk dapat menyebrang ke Australia. Belum lagi keterbatasan pengawasan di laut oleh kapal-kapal patroli Indonesia menjadi faktor makin meningkatnya jumlah imigran gelap dan pencari suaka yang melalui perairan Indonesia.

Selain itu faktor lain yang membuat pemerintah Indonesia melakukan kerjasama keamanan maritim dengan pemerintah Australia yaitu kerjasama keamanan maritim merupakan salah satu poin kerjasama dalam Perjanjian Lombok, dimana Perjanjian Lombok merupakan salah satu upaya peningkatan hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan agar hubungan bilateral Indonesia dan Australia menjadi lebih stabil. Banyak kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh kedua pemerintah. Tetapi baik kedua pemerintah menginginkan adanya kerangka kerjasama pertahanan yang membahas secara utuh semua teknis kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Dalam kerjasama ini Indonesia memiliki keinginan agar Australia tidak turut campur dalam urusan politik dalam negeri Indonesia yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi faktor khusus yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama keamanan ini.

Indonesia dan Australia adalah dua negara bertetangga dengan segala perbedaannya. Oleh karena itu, kerjasama keamanan kedua negara merupakan hal yang tak terhindarkan. Dalam hal ini, Indonesia berbicara pada aspek kepentingan kedaulatan, sementara Australia berbicara pada kepentingan strategis. Sebab kerjasama antara dua negara dapat terjalin karena mengandung aspek pengakuan kedaulatan masing-masing negara. Karenanya Indonesia merasa sangat perlu untuk dapat menjalin kerjasama dengan Australia, untuk dapat mengikat Australia dalam suatu perjanjian Australia agar tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Dalam pasal 2 pada Perjanjian Lombok dinyatakan bahwa kedua negara agar menahan diri untuk tidak menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap pihak lain. Perjanjian ini juga menekankan untuk saling menghormati integritas teritorial, kesatuan dan kemerdekaan masing-masing negara. Hal ini sangat penting bagi Indonesia karena dalam perjanjian ini memasukan klausul yang menolak intervensi dari Australia terkait dengan isu separatisme. Poin ini menjadi suatu yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia terkait diplomasi bilateral dengan Australia. Demikian dengan Australia, yang menganggap perjanjian ini bagian yang tidak terlepaskan dari kepentingan nasionalnya.

Pasang surutnya situasi politik antara kedua negara mengharuskan Indonesia memiliki daya tawar yang kuat bagi Australia. Dengan kerjasama ini, terlihat bahwa Australia membutuhkan rekan untuk menjaga keamanan maritim di wilayahnya. Dan bagi Indonesia kerjasama ini memiliki peran penting dalam mengukuhkan kedaulatan

NKRI dalam suatu dokumen perjanjian. Kerjasama ini menjadi *win win solution* bagi kedua negara karena dapat menjembatani kepentingan nasional Indonesia dan Australia. Serta dapat memperkokoh hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Sehingga situasi politik antar dua negara bertetangga ini dapat lebih stabil dan terhindar dari isu-isu politis sensitif yang dapat mengancam hubungan kerjasama di masa mendatang.

Salah satu contoh turut campurnya Pemerintah Australia dalam urusan politik dalam negeri Indonesia adalah pada saat pada tahun 2006 pemerintah Australia memberi visa sementara kepada 42 orang penduduk Papua yang membuat hubungan bilateral kedua negara sedikit terganggu. Terlepas dari kerjasama keamanan maritim yang telah dilakukan kedua negara, dalam prakteknya masih ada batas-batas dan kedaulatan negara yang dilanggar. Dengan ditariknya duta besar Indonesia untuk Australia pada waktu itu Hamzah Thayeb merupakan sikap Indonesia atas pemberian visa sementara pada 42 warga Papua oleh Pemerintah Australia.

Sedangkan pada tahun 1988 pada masa pemerintahan Presiden Habibie, terjadi konflik di Timor Timur saat terjadi referendum, Pemerintah Australia memberian dukungan kepada Timor Timur untuk melepaskan diri dari NKRI. Hal ini berakibat pada terhentinya kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia pada saat itu yang bernama AMS. Hal ini memperlihatkan bagaimana Pemerintah Australia dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia dengan leluasa. Keadaan semacam ini harus dihindari oleh Pemerintah Indonesia agar Kedaulatan NKRI dapat terjaga dengan seksama.

4.2 Program Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia-Australia Dalam Menjalankan Kerjasama Keamanan Maritim Dalam Kerangka Perjanjian Lombok

Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia dalam kerjasama keamanan maritim ini mengacu pada dua poin kerjasama keamanan maritim yang ada pada isi Perjanjian Lombok. dalam isi perjanjian ini disebutkan bahwa kerjasama bilateraluntuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk meneapkan langkah-langkah keamanan maritim, secara konsisten denan hukum internasional. Selain itu untuk meningkatkan kegiatan kerjasama pertahanan dan kerjasama lainnya yang telah ada dan pembangunan kapasitas dalam bidan keamanan udara dan maritim sesuai dengan hukum internasinal.

Maka dari itu dengan melihat ruang lingkup kerjasama keamanan maritim yang tertuang dalam isi Perjanjian Lombok, program-program yang dilakukan dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim antara Pemerintah Indonesia dan Australia meliputi latihan bersama, join *rescue* antara Basarnas dan AMSA dan patroli bersama.

4.2.1 Latihan Bersama

Dalam melaksanakan kerjasama keamanan maritim ini, Indonesia dan Australia tetap menjalankan program-program latihan bersama yang sudah ada. Salah satunya adalah Latihan Bersama antara TNI Angkatan Laut dan RAN yang ditujukan untuk pengamanan di wilayah perbatasan laut kedua negara. Ancaman-ancaman yang ada di

wilayah perbatasan laut ini meliputi penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, serta pelanggaran wilayah. Latihan Bersama ini bernama CASSOWARY.

Laksamana Pertama TNI Slamet Yulistiyono mengatakan, tingginya angka kegiatan ilegal di wilayah Timur Indonesia dan perbatasan laut Indonesia-Australia membuat kedua pihak harus membangun kerjasama yang konstruktif dalam berbagai bidang, seperti patroli bersama, pertukaran perwira, serta latihan bersama angkatan laut kedua negara. Materi latihan selama kapal berlayar dari Darwin, Australia menuju Kupang, NTT itu meliputi latihan menembak baik siang maupun malam hari dengan sasaran kapal permukaan atas air, udara, manuver kapal-kapal. Selain meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan ketrampilan prajurit angkatan laut kedua negara, kegiatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara yang lebih baik (http://www.beritaindonesia.co.id/hankam/1272-kerja sama-dua-angkatan-laut- diakses pada tanggal 05/02/2014). Latihan CASSOWARY yang dilakukan pada tahun 2008 melibatkan KRI Hiu-804 dan Armidale-P 83.

Latihan bersama lain yang dilakukan oleh kedua negara terkait kerjasama keamanan maritim ini adalah latihan bersama Kakadu. Latihan yang yang ini melibatkan negara-negara seperti Pakistan, Jepang, India, Filipina, Malaysia, Perancis, Selandia Baru, Singapura, Papua Nugini, serta Thailand. Latihan ini berfungsi sebagai peingkat kemampuan tempur laut dan untuk meningkatkan peran dan kerjasama dengan kekuatan kawasan dalam operasi gabungan Kakadu ini.

Selama pelaksanaan latihan Kakadu pada tahun 2008, RAN menunjukan kapal perang barunya HMAS Sirius dengan Anzac Class Frigate HMAS Toowomba,

Adelaide Class Frigate HMAS Melbourne, dan kapal selam Collinn Class HMAS Collins, Armydable Class Patrol Boat HMAS Maryborough dan HMAS Maitland serta dua kapal ranjau HMA Ship Diamantina dan Gascoyne. Kekuatan pertahanan Australia lainnya adalah Air Force Hornet dan Fighter Hawk dan dua AP-3C Orion. Jepang mengerahkan kapal peraangnya JBS Samidare dan helikopter Seahawk, Malaysia (KD Jebat), Perancis (Flotilla 25F), Selandia Baru (5SQN, 1 x P-3K), Pakistan (PNS Babur (DD), heli Allouette, PNS Nasr (AO) dan heli Seaking), Papua Nugini (kapal perang HMPNGS Rabaul (PB) dan HMPNGS Dreger (PB), Singapura (RSS Vigour (MCV), RSS Vengeance (MCV) dan 121 SQN (1 x F50 enforcer) serta Thailand HTMS Sukothai (FSGM) dan 102 SQN (1 x P-3T) (http://urang-jampang. blogspot.com/2008/09/alutsista.html diakses pada tanggal 05/02/2014).

Latihan ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara di Asia Pasifik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Keikutsertaan TNI Angkatan Laut dalam latihan ini dimaksudkan sebagai ajang komparasi profesionalitas prajurit dalam menguasai berbagai problem latihan yang dilaksanakan, sekaligus untuk menguji kemampuan alutsista yang dimiliki dihadapkan pada kemampuan alutsista negara lain (http://www .tnial.mil.id/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/9376/Default.asp diakses pada tanggal 05/02/2014).

Selain itu, program yang dilakukan dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia adalah melalui program latihan bersama yang diberi nama *NEW HORIZON*. Program latihan dua tahunan antara TNI Angkatan Laut dan

RAN Australia ini dilaksanakan pada tanggal 16-22 Juni 2009, program ini dilakukan dalam dua fase latihan. Dalam latihan ini Australia membawa HMAS Manoora (L-52) yang merupakan kapal perang jenis *Landing Platform Amphibious Ship* dan Indonesia menggunakan KRI Surabaya591**.** Latihan tersebut meliputi perhubungan, teknik permesinan, penanganan kargo, kesehatan medis, pengawasan kerusakan, *boarding VBSS* dan *hello operation prosedures*. Selanjutnya pada 22 Juni HMAS Manoora akan bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju laut Jawa untuk melakukan latihan fase kedua, yakni manuver lapangan sebagai penerapan latihan yang telah dilaksanakan di pangkalan sebelumnya. Pada manuver lapangan ini, TNI AL dari jajaran Koarmatim mengerahkan kapal dari jenis yang sama dengan kapal perang Australia jenis *Landing Platform Dock*, yakni KRI Surabaya-591 (http://www.tni.mil.id/view-14282al+australia+dan+koarmatim+gelar+latihan+bersama.html. diakses paa tanggal 10/02/2014).

Dan pada latihan selanjutnya, sebagai hasil kerjasama ditahun 2010, Australia membawa kapal Australia HMAS Warramunga dan HMAS Sirius tiga hari latihan bersama di laut guna mengadakan latihan Exercise New Horizon, latihan bilateral dua tahunan antara Angkatan Laut Australia dan Angkatan Laut RI. Sedangkan Indonesia mengunakan KRI Frans Kaisiepo dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma dalam latihan ini. Latihan bersama New Horizon telah dikembangkan dari skenario dari latihan sebelumnya, melakukan jenis latihan taktis dengan pasukan yang menggunakan metode maneuver lapangan. termasuk diantaranya latihan saat di laut dimana tergabung beberapa kegiatan kompleks seperti mendaratkan, menerbangkan

helikopter TNI AL diatas kapal HMAS Warramunga, latihan menembak meriam–*Gunnery Firing Exercise*, pengeledahan dan penyerangan diatas kapal HMAS Sirius yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan melakukan perpindahan perlengkapan menggunakan metode lini transfer antar dua kapal di laut. Latihan-latihan ini adalah untuk meningkatkan dan menguji kemampuan prajurit dan Alutsista TNI AL dalam merencanakan dan mengendalikan mekanisme operasi secara tepat guna dan berhasil guna dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang akan terjadi (http:// ikahan.com/2011/11/angkatan-laut-australia-indonesia-gelar-latihan-bersama-new-horizon-2011/ diakses pada tanggal 10/02/2014).

4.2.2 Join *Rescue* SAR dan AMSA

Tim SAR Indonesia dan AMSA Australia melaksanakan latihan gabungan di Perairan Laut Timor, guna meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Latihan bersama kedua negara diberi nama "Sarex Ausindo 2009" yang dilaksanakan pada 9-12 November 2009 di Kupang. Sarex Ausindo sebagai Media koordinasi kesiapsiagaan penyelenggaraan operasi SAR di sekitar Perbatasan antara Indonesia dan Australia. Dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Kantor SAR Kupang dan Australia dalam pengendalian operasi SAR bersama di daerah perbatasan antara Australia dan Indonesia dan melaksanakan prosedur yang telah disetujui bersama antara Indonesia dan Australia (http://forumpeduli demokrasi.wordpress. com/2009/11/10/basarnas-gelar-latihan-bersama-dengan-aussar/ diakses pada tanggal 06/02/2014).

Materi latihan gabungan tim SAR Indonesia dan Australia adalah manuver lapangan atau upaya penanganan bencana alam dan kecelakaan pelayaran. Letak Australia dan Indonesia terutama wilayah NTB dan NTT cukup dekat atau berbatasan langsung sehingga dipandang penting untuk melakukan latihan gabungan. Tujuan dari latihan gabungan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan koordinasi dan operasional SAR jika sewaktu-waktu diperlukan dalam operasi SAR sesungguhnya. Mengingat wilayah Kupang adalah salah satu wilayah yang rawan kecelakaan transportasi dan bencana alam secara geografis sehingga Indonesia harus terus meningkatkan kesiapsiagaan dan tindakan preventif guna mencegah terjadinya musibah yang dapat merugikan semua pihak. Melalui kegiatan ini kedua pihak dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat.

Karena sesuai Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Chicago pada tahun 1944, wajib hukumnya bagi setiap negara untuk menyiapkan penyelenggaraan operasi SAR, demikian pula Indonesia dan Australia yang harus menyiapkan hal itu terutama dalam meningkatan SDM petugas SAR. Oleh karen itu program kerjasama antara SAR Indonesia dan AMSA Australia juga berperan penting dalam menjaga keamanan maritim di wilayah perbatasan laut kedua negara.

Dalam latihan gabungan Sarex Ausindo itu, akan disimulasikan upaya pertolongan terhadap para korban kecelakaan pelayaran di perairan Sekotong, Lombok Barat. Dalam penanganan musibah itu, Tim SAR Indonesia meminta bantuan kepada AMSA Australia karena jaraknya lebih dekat dibanding regu bantuan

dari Jakarta. Helikopter dan kapal Australia yang dilengkapi peralatan evakuasi akan merapat ke lokasi bencana untuk mengevakuasi korban kecelakaan pelayaran itu, kemudian disinkronkan dengan upaya tim SAR Indonesia yang juga diterjunkan ke lokasi. Tim SAR Indonesia juga akan melibatkan kapal evakuasi yang ukurannya lebih besar yang mampu mengarungi gelombang lebih dari empat meter, yang didatangkan dari Pulau Bali.

4.2.3 Patroli Bersama

Kerjasama maritim ini juga dilaksanakan dalam bentuk latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan survelensi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu, masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut serta staf markas besar. TNI AL mengirimkan dua korvet kelas Parchim KRI Wiratno dan Hasan Basri serta satu unit pesawat intai NC-212. Sedangkan RAN menurunkan kapal patroli kelas Amidale HMAS Maryborough dan satu unit pesawat intai AP-3C Orion milik RAF. Operasi ini dilakukan di sepanjang garis perbatasan ZEE Indonesia dan Australia.

Dengan adanya opersi ini diharapkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di di garis perbatasan laut kedua negara dapat teratasi baik itu masalah pelanggaran wilayah, penyelundupan dan penangkapan ikan ilegal. Pemberian informasi oleh Australia terkait kapal-kapal nelayan ilegal yang melakukan penangkapan ikan diwilayah Indonesia juga menjadi keuntungan dari kerjasama ini. Patroli ini di

lakukan setiap tahun oleh indonesia dan Australia guna mencegah ancaman-ancaman yang akan merugikan kedua negara.

Lemahnya pengawasan Indonesia di wilayah laut dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk melakukan kegiatan ilegal. Dengan seringnya patroli ini dilakukan oleh kedua negara dimaksudnya untuk dapat mencegah tindakan serta aksi ilegal tersebut sebelum masuk ke wilayah Indonesia atau Australia.

Dana yang telah dikeluarkan pemerintah Australia terkait paket kerjasama teknik Indonesia Australia yang disalurkan pada program keselamatan penerbangan dan maritim digunakan untuk pemasangan *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS) di pusat-pusat Komandao Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Kupang, denpasar, Tual (Maluku) dan Merauke. GMDSS adalah sistem yang disepakati secara internasional untuk prosedur keamanan, sebagai alat dan protokol komunikasi untuk meningkatkan keamanan laut dan mempermudah penyelamatan kapal, perahu dan pesawat. GMDSS terdiri dari beberapa sistem seperti *Emergency Position-indicating Radio Beacon, Search and Rescue Locating Device*, NAFTEX, *Digital Selective Calling,* dan *High Frequncy Radiotelephone.*

4.3 Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Indonesia-Australia Dalam Menjalankan Kerjasama Keamanan Maritim Dalam Kerangka Perjanjian Lombok

4.3.1 Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh dua negara ini, hal yang dibutuhkan adalah SDM pertahanan yang memadai. Bukan hanya sekedar peralatan teknologi yang canggih, tanpa ada sumber daya yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Terlebih lagi dibutuhkan komunikasi antar personel lembaga dua negara tersebut untuk kelancaran dan menghindari konflik serta kesalahpahaman dalam pelaksanaan program kerjasama keamanan maritim.

Kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh Indonesia akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan dilapangan. Situasi di lapangan yang mengharuskan personil untuk terus berkoordinasi dengan pihak Australia dan memahami segala bentuk strategi serta operasi yang dilakukan dalam kerjasama keamanan maritim ini.

Pada pelaksanaannya hambatan ini dapat diatasi dengan memberikan beasiswa dan pelatihan bagi personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Indonesia di Australia. Pelatihan ini diberikan dengan harapan dapat memberi pengetahuan lebih kepada para personil Indonesia untuk dibawa kembali untuk diterapkan dan dibagi kepada personil TNI yang lain, maupun untuk mengatasi kendala perbedaan bahasa yang digunakan antara personil TNI dengan personil RAN.

Upaya lain yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan SDM pertahanan yang mampu mendukung kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dapat dilakukan melalui :

a) Meningkatkan pembinaan potensi SDM memlaui pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka penyiapan Kompnen Cadangan dan Komponen Pedukung sebagai bentuk model embrio untuk dikembangkan dimasa mendatang.
b) Menintensifkan pendataan Pontensi Sumber Daya Nasional sebagai langkah awal penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung
c) Membina koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta instansi terkait.

Selain itu Potensi SDM pertahanan yang dimiliki setiap Warga negara Indonesia merupakan penggerak untuk mendukung pelaksanaan konsep pertahanan. Oleh karena itu kebijakan pelaksanaan pembinaan potensi SDM pertahanan negara harys dilakukan secara terencana, terpadu, konsepsional dan sistematis serta berkelnjutan. Kegiatan pembinaan potensi SDM pertahanan dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen SDM pertahanan negara yang meliputi kegiatan :

a) Perencanaan kebutuhan, yang dilakukan secara terpusat melalui kegiatan pendataan, klasifikasi, serta penyusunan formasi.
b) Pelaksanaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan rekruitmen, pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran, serta pengorganisasian.

c) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, pengawasan fungsional dan melekat.

Proses kegiatan pembinaan dan pengelolaan potensi SDM untuk pertahanan yang dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib terhadap seluruh warga negara Indonesia.

Pembinaan potensi SDM pertahanan negara merupakan tugas dan tanggung jawab Departemen Pertahanan dan Mabes TNI bersama segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta instansi pemerintah terkait, yang dilaksanakan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah oleh masing-masing instansi terkait. Pembinaan potensi SDM pertahanan ditujukan kepada seluruh warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung kompoen kekuatan pertahanan negara (http://ikal.or.id/index.php/strategi-penguatan-sumber-daya-manusia-pertahanan.html diakses pada tanggal 10/02/2014).

Apabila langkah-langkah diatas dilaksanakan dengan baik, maka warga negara Indonesia akan memiliki rasa bela negara yang tinggi serta rasa cinta dan bangga pada tanah air. Kesadaran ini akan sangat berpengaruh dalam berkembangnya SDM pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan Indonesia untuk melindungi dirinya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

4.3.2 Keterbatasan Alat Utama Sistem Pertahanan Negara (Alutsista) Indonesia

Dengan keterbatasan alutsista, penggelaran kekuatan di laut sebagian dititikberatkan pada daerah rawan, seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi (termasuk Blok Ambalat), Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Laut Natuna, Laut Timor, Laut Arafuru dan wilayah perbatasan lainnya. Wilayah-wilayah perairan itu mendapat perhatian khusus karena kerawanannya, baik adanya sengketa batas maritim, pembajakan dan perompakan di laut (*piracy and armed robbery*), pencurian sumber daya alam dan lain sebagainya. Keterbatasan ini dipengaruhi pula oleh anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk Angkatan laut. Sebagian besar dari dana ini digunakan untuk pemeliharaan 145 kapal perang dan patroli serta operasi laut.

Kapal Republik Indonesia merupakan kekuatan vital terdepan pertahanan Indonesia untuk mengawal wilayah maritim NKRI dengan segala kepentingannya. Prioritas diarahkan untuk pengadaan Kapal Patroli cepat hingga mencapai keseimbangan kekuatan di tiap wilayah. Pengadaan kapal selam secara bertahap mewujudkan kekuatan pokok minimum, khususnya dalam mengamankan jalur-jalur pelintasan ALKI. Kekuatan KRI untuk memenuhi standar kekuatan pokok minimum adalah 274 kapal yang terdiri dari berbagai jenis. KRI disusun dalam tiga kelompok kekuatan, yakni kekuatan Tempur Pemukul, Kekuatan Tempur Patroli, dan Kekuatan Dukungan. Kekuatan Tempur Pemukul diproyeksikan untuk mencapai kekuatan pokok minimum dengan susunan Kapal Perusak Kawal, Kapal Perusak Kawal Rudal, Kapal Selam, Kapal Cepat Rudal, Kapal Cepat Torpedo, dan Kapal Buru Ranjau. Kekuatan Tempur Patroli diproyeksikan untuk mewujudkan kemampuan satuan-

satuan operasional TNI AL dalam menyelenggarakan patroli dan pengamanan wilayah perairan Nusantara dengan Kapal Patroli dari berbagai jenis. Kekuatan Tempur Pendukung secara bertahap akan ditingkatkan kemampuannya agar mampu menyelenggarakan fungsinya yang terdiri atas Kapal Markas, Kapal Angkut Tank, Kapal Penyapu Ranjau, Kapal Angkut Serba Guna, Kapal Tanker, Kapal Tunda Samudra, Kapal Hidro Oseanografi, Kapal Bantuan Umum, Kapal Angkut Personel, dan Kapal Latih (http://www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf diakses pada tanggal 21/01/2014).

Tabel 4.1

Perbandingan Postur *Naval Aviation* Format Ideal dan kekuatan Riil

No.	UNIT	JUMLAH NYATA	JUMLAH IDEAL	KEBUTUHAN
1	Personal *Naval Aviation*	1.0000	22.000	21.000
2	*Fighter*	0	210	30
3	*Fighter Ground Attack*	0	420	420
4	Pesawat Intai	0	28	28
5	Pesawat *Support*	0	14	14
6	Pesawat Patroli	27	27	0
7	Pesawat *Transport*	15	15	0

8	Pesawat *Training*	6	30	24
9	*Attack helicopter*	0	310	310
10	*Anti-Submarine Helicopter*	9	290	281
11	Helikopter SAR	0	28	28
12	*Reconnaissance*-Heli	0	28	28
13	*Support*-Heli	6	3	0
14	*Utility*-Heli	22	22	0

(*sumber : Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)*

Kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia rata-rata berusia di atas 30 tahun, baik kapal selam, kapal fregat, kapal korvet, kapal amfibi, kapal bantu maupun pesawat udara. Upaya modernisasi kekuatan Armada RI berjalan kurang lancar karena komitmen pemerintah yang kurang berpihak kepada pengembangan Angkatan Laut. Sebagai contoh, rencana pengadaan kapal selam yang masuk dalam Perencanaan Strategis (Renstra/*Naval Strategic Planning*) TNI Angkatan Laut 2005-2009 sampai saat ini belum menemukan titik terang karena berbelitnya proses di Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009 (http://www.lesperssi.org/89-almanak-reformasi-sektor-kemanan-indonesia-2009 diakses pada tanggal 04/02/2014).

Tabel 4.2

Perbandingan Alutsista Yang Dimiliki

TNI Angkatan Laut Dan *Royal Australian Navy*

No.	Unit	Indonesia	Australia
1.	Kapal Selam	2	6
2	Kapal Perang		
	Jenis *Frigatte*	13	4
3	Kapal Patroli	23	14
4	Kapal Penjinak Ranjau	11	6
5	Kapal Pendukung	26	13
6	Pesawat Patroli	27	6
7	*Support-Heli*	6	6
8	*Utility-Heli*	2	3
9	*Anti-Submarine Helicopter*	9	16
10	Personil	55.068	16.000

(*sumber : Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan http://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft)*

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan Alutsista yang dimiliki kedua negara. Baik Indonesia maupun Australia memilki kekurangan dan kelebihan dari alutsista ya mereka miliki. Meskipun kapal-kapal Australia jumlahnya lebih sedikit dari yang dimilki Indonesia, kapal-kapal tersebut beroperasional secara penuh dan aktif serta memiliki dukungan persejataan yang lebih dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam hal pertahanan TNI Angkatan Laut juga memerlukan pesawat udara yang berguna untuk membantu kapal patroli dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Pesawat Udara merupakan salah satu unsur kekuatan laut yang penting untuk penyelenggaraan fungsi pengendalian laut, penegakan hukum di laut, serta dukungan proteksi bagi kekuatan darat. Wilayah perairan Nusantara yang luasnya mencapai lebih dari 6 juta kilometer persegi membutuhkan 137 unit Pesud dari jenis sayap tetap dan sayap putar untuk memenuhi standar kekuatan minimum. Pesud dengan kekuatan 137 unit tersebut diproyeksikan mampu melaksanakan patroli maritim dalam rangka fungsi pengendalian laut dan penegakan hukum di laut, serta sebagai sarana angkut terbatas dan untuk kebutuhan latihan. Di samping Alutsista yang usianya kritis, seperti diuraikan di atas, pertahanan matra udara tidak mungkin mengandalkan kemampuan pesawat tempur semata, tetapi juga harus didukung oleh alat penginderaan jarak jauh. Satuan radar untuk pertahanan udara belum dapat tercukupkan sampai dengan saat ini sehingga pengamatan terhadap ruang udara belum maksimal. Bersamaan dengan usaha-usaha untuk penggantian terhadap Alutsista yang telah habis masa pakainya, juga diarahkan untuk mengisi kekosongan

sistem pengamatan udara jarak jauh bagi unsur-unsur satuan radar pertahanan udara. (http://www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf diakses pada tanggal 21/01/2014).

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan nasional, diikuti oleh pembangunan infrastruktur. Apabila diukur dari nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif konstan, yakni berada di bawah 1% (http://www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf diakses pada tanggal 21/01/2014).

Tabel 4.3

Realisasi Anggaran Pertahanan Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Anggaran	Sumber
2005	23,1 Triliun	*http://www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf*
2006	28,2 Triliun	

2007	32,6 Triliun	
2008	33,6 Triliun	
2009	33,6 Triliun	*http://beritahankam. blogspot.com/2009/05/anggaran-pertahanan-ri-tidak-masukakal.html*
2010	42,9 Triliun	*http://www.tempo.co/read/news/2010/12/30/078302735/Penyerapan-AnggaranKeme nterian-Pertahanan-100-Persen*

(Keterangan: Dalam Rupiah)
(Sumber: Dari berbagai sumber)

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 67% merupakan anggaran rutin, sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 33%. Dari anggaran yang teralokasi untuk pembangunan pertahanan, sekitar 83%-nya atau sekitar 16% dari total anggaran pertahanan berbentuk kredit ekspor yang pengelolaannya sangat kompleks dan sering mengalami kesulitan untuk mencairkannya. Anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista, dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni dalam kerangka mengatasi konflik yang berdimensi keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia serta membantu pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah semakin menyadarkan betapa pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik personel maupun Alutsista, serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi. Di sisi lain, kenyataan bahwa alutsista TNI banyak berusia tua, tetapi masih dipertahankan karena proses regenerasi berupa pengadaan Alutsista generasi baru

untuk menggantikan alutsista yang sudah usang berjalan sangat lambat (http://www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d18e5c5dc3f56b34e3.pdf diakses pada tanggal 21/01/2014).

Pada tahun 2009 Dephan mengajukan anggaran kebutuhan minimun pertahanan sebesar Rp127 triliun, tapi pemerintah hanya sanggup memenuhi sebesar Rp33,6 triliun atau sekitar 26 persen dari anggraan yang diajukan (http://beritahankam.blogspot.com/2009/05/anggaran-pertahanan-ri-tidakmasukakal.html diakses pada tanggal 11/02.2014). Sedangkan pada tahun 2010 realisasi anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 42,9 triliun. Menurut Menteri Pertahana Juwono Sudarsono, kebutuhan minimal Departemen Pertahanan dan TNI seharusnya Rp 100,53 triliun (http://www.tempo.co/read/news/2010/12/30/078302735/Penyerapan-AnggaranKementerian-Pertahanan-100-Persen diakses pada tanggal 11/02/2014). Dengan begitu anggaran pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan departemen pertahanan untuk penyelenggaraan pertahanan keamanan Indonesia.

Dilihat dari data realisasi anggaran pertahanan Indonesia, dapat dilihat tiap tahunnya Pemerintah Indonesia mengusahakan sebaik mungkin untuk menaikan anggaran pertahanan Indonesia. Minimnya anggaran yang diperlukan untuk peremajaan dan pemeliharaan alutsista dikarenakan anggaran pertahanan yang disetujui dan diberikan oleh pemerintah tiap tahunnya bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sedangkan dari pihak Pemerintah Australia, faktor yang menghambat kelancaran kerjasama keamanan maritim ini adalah dari segi politik. Sensitifnya politik antara Indonesia dan Australia, membuat setiap jajaran departmen pertahanan dan pemerintahan masing-masing negara ini harus selalu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Perilaku politik kedua negara ini sangat berdampak besar terhadap hubungan kedepan kerjasama keamanan maritim kedua negara ini.

Salah perhitungan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah masing-masing negara akan mengancam keberlangsungan kerjasama keamanan ini. Namun Pemerintah Indonesia dan Australia harus dapat kenyingkirkan kepentingan masing-masing partai politiknya, agar dapat terbuka peluang kerjasama keamanan yang lebih dinamis untuk pemenuhan kepentingan nasional masing-masing negara. Terlepas dari masalah politik, budaya merupakan hambatan lain dari kerjasama keamanan ini. Perbedaan budaya antara Indonesia dan Australia tentunya akan menjadi hambatan sosial di lapangan. Terutama dalam pelaksanaan program-program kerjassama yang dilakukan oleh kedua negara ini.

Masing-masing peserta program dari kedua negara diharuskan mengerti dan paham tentang beberapa budaya mendasar negara tersebut. Agar tingkat keberhasilan yang tinggi dapat dicapai dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kerjasama ini. Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik pada peserta program kerjasama. Yang harus ditekankan kepada para peserta program adalah bahwa kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Australia dan untuk menjaga stabilitas keamanan masing-masing negara.

4.4 Keuntungan Yang Diperoleh Pemerintah Indonesia Dari Kerjasama Keamanan Maritim Dalam Kerangka Perjanjian Lombok

Mengingat bahwa perjanjian kerjasama keamanan Indonesia-Australia telah ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak, sudah sewajarnya semua pihak keamanan di Indonesia mempersiapkan diri dengan sejumlah bentuk kerjasama keamanan. Termasuk di dalamnya kerjasama keamanan maritim, yang dirancang untuk mengamankan kepentingan nasional di laut, termasuk menghadapi kemungkinan ancaman-ancaman yang ada. Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri.

Tujuan utama yang diperoleh dari kerjasama ini untuk Australia adalah dalam rangka mencegah masuknya *illegal migrant* ke negara tersebut sedangkan kepentingan nasional Indonesia antara lain mencegah *illegal fishing* dan *illegal activity* termasuk kemungkinan pelarian simpatisan OPM dalam rangka mencari suaka politik atau dukungan simpati internasional melalui selat Torres dari Papua ke Australia.

Indonesia terletak di utara Australia yang berbatasan laut dengan dengan negara ini. Dengan adanya perbatasan laut bersama menjadi tantangan bersama kedua

negara. Kerjasama pertahanan Indonesia-Australia yang berawal pada tahun 1970-an yang mulai dari kerjasama di bidang pengawasan wilayah maritim, yang menjadi pengukuhan pentingnya keamanan maritim bagi kedua negara.

Dengan adanya kerjasama keamanan maritim dengan Australia yang meliputi semua elemen yang angkatan laut dan Basarnas, maka Indonesia mendapat keuntungan dari segi pengamanan batas laut. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas serta alutsista yang kurang mendukung untuk menjangkau semua daerah perbatasan laut di wilayah Indonesia lainnya, segala bentuk kerjasama yang telah dilakukan akan sangat membantu Pemerintah Indonesia dalam melalakukan pengawasan di wilayah laut.

Semakin seringnya ancaman-ancaman masuk ke wilayah perairan Indonesia akan membuat kewalahan pihak yang berwenang. Dengan adanya kerjasama ini akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Angkatan Laut melalui program-program kerjasama lainnnya yang bersifat untuk menunjang kerjasama yang telah ada.

Dengan begitu secara bertahap, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi wilayah maritimnya akan terlaksana, seiring dengan meningkatnya sumber daya manusianya, terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Angkatan Laut dan segenap jajaran pendukung program kerjasama ini.

Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar

dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Indonesia menempatkan keamanan kawasan yang mengitari Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan pertahanan Indonesia secara utuh.

Indonesia juga menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global. Pada lingkup regional, kepentingan pertahanan Indonesia adalah terwujudnya kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman dan stabil, terbebas dari konflik antar sesama anggota kawasan. Dinamika lingkungan keamanan strategis tersebut mengindikasikan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ancaman yang dihadapi pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa semakin berkembang menjadi multidimensional, fisik dan nonfisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri.

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia dalam bidang kerjasama maritim lebih merupakan keberlanjutan dari kerjasama-kerjasama yang sudah ada sebelumnya. Kerjasama keamanan maritim ini juga turut menyumbang keamanan kawasan. Prinsip dasar kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia memiliki kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan itu berupa saling mendorong untuk pemahaman antara masing-masing militer kedua negara dalam hal kebiasaan dan sudut pandang agar tidak terjadi konflik yang sifatnya sensitif. Selain itu untuk

mendukung peningkatan kapasitas bagi ketahanan kawasan. Dan yang paling penting adalah memperkuat keamanan maritim. Kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan, dalam hal ini keamanan maritim merupakaan salah satu poin penting dalam menjaga keamanan kawasan dari ancaman agar tetap stabil dan aman.

Keuntungan lain yang akan didapat oleh pemerintah Indonesia dari kerjasama yang dijalankan bersama pemerintah Australia ini adalah dalam segi teknologi melalui pengadaan GMDSS yang sangat bermanfaat dalam melakukan kontrol lalu lintas di wilayah laut.

Namun dari semua itu keuntungan yang paling nyata dirasakan oleh Indonesia adalah dengan terjalinnya kerjasama keamanan maritim dalam kerangka Perjanjian Lombok menjadi titik balik makin membaiknya hubungan Indonesia dengan Australia yang pasca lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI menjadi tidak stabil.

Hal ini juga sebagai penegasan bagi pemerintah Australia agar tidak lagi mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia. Hal tersebut sangat penting bagi Indonesia, karena sebagai negara berdaulat Indonesia berhak untuk menjalankan urusan perpolitikan negaranya tanpa campur tangan pihak asing yang hanya akan dapat memperkeruh situasi dan membuat buruk citra Indonesia dimata dunia internasional sebagai negara yang dapat diintervensi kedaulatannya oleh negara lain.